

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhelatan pemilihan kepala daerah yang disebut dengan Pilkada, merupakan momentum bagi determinasi kebijakan publik di arus lokal yang melibatkan peran serta masyarakat. Pilkada langsung selalu menarik perhatian setiap lapisan masyarakat untuk ikut terlibat, karena menjadi agenda yang penting bagi keberhasilan fondasi kedaulatan rakyat, sistem politik dan penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah. Secara implisit, antusiasme dan apresiasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada dimaknai sebagai bentuk operasionalisasi otonomi dari masyarakat yang menentukan sendiri, serta memilih secara langsung kepala daerah mereka.

Kepala daerah yang mencalonkan dirinya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, dituntut dapat menyusun strategi yang mumpuni agar berhasil mendulang suara tertinggi. Oleh karena itu, penting bagi calon kepala daerah untuk memiliki kemampuan dalam memperoleh kepercayaan dan hati masyarakat di daerah pemilihannya. Sebab, terpilihnya suatu kandidat politik merupakan hasil suara masyarakat di daerah konstituen pasangan calon tersebut. Salah satu kekuatan yang diandalkan bagi pasangan calon kepala daerah, untuk menarik simpati masyarakat adalah Janji Kampanye atau Janji Politik. Janji kampanye yang disampaikan oleh

pasangan calon bersifat politis, dengan maksud untuk memperoleh hak suara masyarakat dalam pemilihan umum.¹

Kepala daerah atau pemerintah dalam menentukan *public policy* menganalisis terlebih dahulu berbagai informasi yang tersebar luas dalam masyarakat, karena dari itu para pemangku kekuasaan berusaha mengawasi atau mengendalikan arus informasi yang tersebar di kalangan masyarakat agar mereka tetap mendapat dukungan untuk berkuasa. Seorang pemimpin politik, baik yang otoriter maupun yang demokrat, ada kecenderungan untuk memanipulasi atau menguasai informasi yang ada untuk masyarakatnya. Pola yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah atau pemerintah cenderung hanya melibatkan masyarakat sebatas pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah saja, jelas pola partisipasi ini hanya tergolong dalam kategori partisipasi minimal saja. Selepas terpilih masyarakat diharapkan tidak ikut berpartisipasi lagi dalam politik karena dianggap sudah diwakilkan oleh kepala daerah atau wakil rakyat yang telah dipilih.²

Satu dekade lalu, media cetak dan penyiaran menjadi sumber utama masyarakat untuk mencari informasi, berdasarkan hasil dari Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) hingga Mei 2020 terhadap 434 media, sebanyak 71 persen pers cetak mengalami penurunan omzet lebih dari 40 persen dibandingkan pada 2019, 50 persen perusahaan cetak telah memotong gaji karyawan dengan besaran dua hingga 30 persen. Kemudian 43,2 persen perusahaan pers cetak telah mengkaji opsi merumahkan karyawan tanpa digaji dengan kisaran 25 hingga 100 orang setiap

¹ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Prenada Media, 2016).

² Rahmawati Halim et al., *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori Dan Praktik*, vol. 1 (Sah Media, 2016).

perusahaan, sedangkan 38,6 persen daerah lebih cenderung mengambil opsi kebijakan ini dibandingkan dengan perusahaan pers nasional sebanyak 4,45 persen.³ Sementara itu masyarakat perkotaan lebih menggunakan internet sebagai sumber informasi karena aksesibilitasnya yang tinggi. Apalagi informasi di internet muncul lebih cepat dibandingkan dengan informasi di media tradisional yang membutuhkan pengolahan sebelum dipublikasikan atau disiarkan.⁴

Sebagai janji yang bersifat politis, janji kampanye dapat direalisasikan jika kandidat atau partai politik berhasil menang dalam pemilihan umum. Namun kenyataannya, janji politik pasca penyelenggaraan pemilihan umum sering kali hanya menjadi komitmen formalitas belaka yang bertolak belakang dengan produk kebijakan. Janji-janji yang digembar-gemborkan selama masa kampanye, tidak jarang diasumsikan sebagai suatu pemanis bibir bagi politisi untuk memikat suara dan hati konstituen mereka.⁵ Ekspektasi yang diberikan kandidat politik melalui janji kampanye, mempengaruhi masyarakat agar yakin dengan harapan bahwa janji tersebut dapat direalisasikan menjadi produk kebijakan publik. Pasangan calon yang hanya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan melalui upaya-upaya “menjual” janji kampanye ini, bisa jadi tidak mementingkan problematika dalam proses pengejawantahan janji politik yang harus diubah menjadi suatu produk kebijakan. Bukan hanya sekedar menjadi “alat” untuk meraih kekuasaan, calon

³ Agus Setiawan, “Ketika Media Cetak Di Indonesia Terus Berguguran,” Antara, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3525258/ketika-media-cetak-di-indonesia-terus-berguguran#mobile-nav>.

⁴ Nielson, “Tren Baru Di Kalangan Pengguna Internet di Indonesia,” 2017, <https://doi.org/https://www.nielson.com/id/news-center/2017/tren-baru-di-kalangan-pengguna-internet-di-indonesia/>.

⁵ Hendri Koeswara, “Kongruensi Janji Politik Kepala Daerah Dan Kebijakan Publik Di Sumatera Barat” (Universitas Andalas, 2010).

kepala daerah harus dapat membuktikan transformasi dari janji kampanye yang terealisasi menjadi produk kebijakan, ketika mereka telah berhasil memperoleh kekuasaan.

Realisasi janji kampanye, seyogyanya menjadi bentuk konfigurasi politik dari pembuatan kebijakan publik secara demokratis. Hal ini berkaitan dengan peran masyarakat dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan, melalui janji kampanye yang disampaikan oleh kandidat politik. Sehingga, dengan langsung masyarakat mengetahui program-program kebijakan seperti apa yang nantinya diberlakukan oleh pasangan calon terpilih. Kebijakan yang dihasilkan pun seharusnya mengacu pada janji kampanye pasangan calon terpilih, karena telah diturunkan dari janji politik dan telah melalui proses interaksi panjang pada suatu lingkungan melalui keterlibatan pembuat kebijakan secara dinamis.⁶ Oleh sebab itulah, ketika pemerintahan telah diselenggarakan harus ada kesesuaian antara janji kampanye pasangan calon terpilih dan produk kebijakan.

Kesesuaian inilah yang disebut sebagai kongruensi.⁷ Kongruensi merupakan padanan kata dari kesesuaian yang merujuk pada kesesuaian dua hal yang berbeda namun saling terkait satu sama lain. Hal tersebut menjadi menarik, apabila peneliti mengkaji kongruensi janji kampanye yang disampaikan dalam pilkada dengan memahami pelaksanaan janji tersebut, ketika pasangan calon terpilih telah mengakuisisi kekuasaan. Sebab, kongruensi antara janji kampanye dengan hasil

⁶ Nurlia Dian Paramita, "Mewujudkan Kampanye Deliberatif Dalam Sistem Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 82–103.

⁷ M Echols, "John Dan Shadily, Hassan, Kamus Inggris-Indonesia, Cet," *Ke-23 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 1996.

produk kebijakan dapat menjadi tolak ukur bagi penyelenggaraan suatu pemerintahan yang demokratis.⁸

Kebijakan yang nantinya dihasilkan, merupakan kebijakan yang bertujuan memecahkan permasalahan publik dan untuk kepentingan publik itu sendiri. Menurut Leo Agustino, kebijakan publik merupakan suatu alokasi otoritatif yang memiliki nilai untuk seluruh masyarakat.⁹ Alokasi nilai-nilai yang mengikat masyarakat tersebut, turut serta memanfaatkan sumber daya dalam memecahkan permasalahan publik yang ada. Hal ini sejalan dengan definisi kebijakan publik menurut Chandler dan Plano, bahwa kebijakan publik memanfaatkan sumber daya yang digunakan untuk memecahkan permasalahan publik, demi kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.¹⁰ Sehingga, sudah seharusnya kebijakan publik dapat mengakomodir dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat.

Dari empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy merupakan kandidat termuda atau dikenal sebagai calon pemimpin milenial, Audy juga dikenal aktif dalam bermedia sosial khususnya Instagram Audy sangat aktif membagikan kegiatan sehari-harinya di platform media Instagram ini. Tercatat dari data awal yang saya peroleh Audy Joinaldy membagikan sebanyak 209 postingan pada media sosial Instagram pada masa kampanye selama 73 hari, berbanding terbalik dengan calon gubernur sendiri yaitu bapak Mahyeldi yang hanya

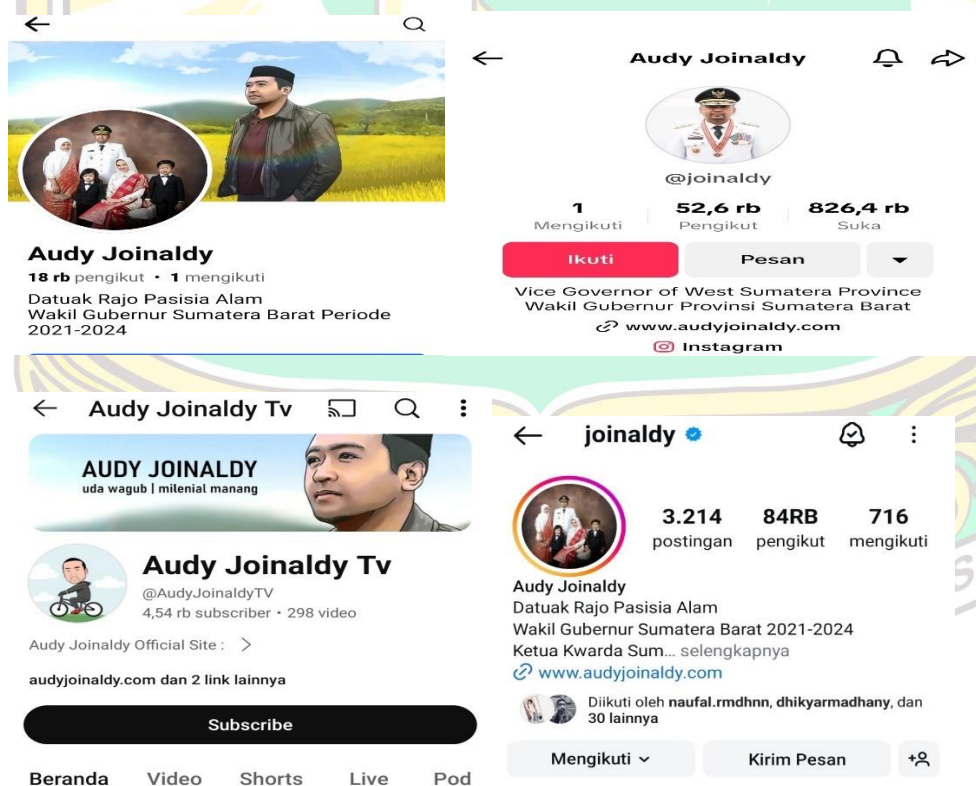
⁸ Fadillah Putra, *Partai Politik & Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik Di Indonesia, 1999-2003* (Pustaka Pelajar, 2004).

⁹ Leo Agustino, "Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal," (*No Title*), 2009.

¹⁰ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus* (Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003).

membagikan sebanyak 73 postingan selama masa kampanye. Dari keseluruhan media sosial yang digunakan oleh Audy yakni: Instagram (80 ribu pengikut), facebook(16 ribu pengikut), dan youtube(4,5ribu pengikut), Instagram menjadi media yang paling aktif dan sering digunakan oleh Audy untuk mengkampanyekan dirinya sebagai wakil gubernur Sumatera Barat, Audy juga memiliki akun media sosial tiktok yang aktif digunakan dan memiliki 52 Ribu pengikut aktif, namun sayangnya media sosial ini dibentuk pada tahun 2021 setelah Audy berhasil terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ini menegaskan bahwa Audy memang menargetkan pengikut media sosial instagramnya untuk menerima janji kampanye atau janji politik yang disampaikan pada masa kampanye.

Gambar 1.1 Media Sosial Facebook, Tiktok, Youtube dan Instagram Audy



Sumber: Media Sosial Audy Joinaldy

Sebagai pasangan Wakil Gubernur yang terpilih dalam Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020, Audy Joinaldy menempatkan fokus pada aspek UMKM dan Pertanian Digital pada janji kampanye yang selalu disampaikan pada postingan media sosial instagram nya dengan slogan “Peduli UMKM dan Pertanian Digital, Revolusi Industri 4.0 di Sumatera Barat”. Untuk mengetahui kongruensi antara janji kampanye dan kebijakan publik, diperlukan rangkaian proses yang dapat menjelaskan bagaimana suatu produk kebijakan pada akhirnya dapat dirumuskan.

Mengacu pada janji kampanye Audy Joinaldy pada media sosial instagramnya yakni: 1. Wujudkan pertanian digital, revolusi industri 4.0 di Sumatera Barat. 2. Peduli UMKM. 3. Program *Digital Creative Entrepreneur* untuk 100.000 Millennial Minang *Entrepreneur*. 4. Pengusaha unggas sukses di era 4.0 dan *New Normal*, menunjukkan antara janji kampanye pada media ingstagram dan realisasi program setelah terpilih belum memiliki kongruensi yang kuat. Menurut Penelitian yang telah dilakukan oleh Supratiwi, partai atau kandidat politik minim terhadap realisasi janji kampanye yang telah disampaikan.¹¹ Sehingga, hal ini mempertegas diperlukannya pengawasan atau evaluasi bagi kongruensi janji kampanye oleh kepala daerah, terkhusus dalam mengawal program-program kebijakan yang minim mendapatkan tempat dalam janji kampanye.

Penelitian Kartini juga menyebutkan, bahwa evaluasi terhadap janji kampanye sangat jarang dilakukan, karena tidak ada lembaga manapun yang peduli terhadap kesesuaian capaian kebijakan dengan janji kampanye yang disampaikan

¹¹ Supratiwi Supratiwi, “Partai Politik & Politik Hijau: Studi Tentang Kepedulian Parpol Terhadap Politik Yang Prolingkungan Di Kota Semarang,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2011): 109–17.

pada publik.¹² Sehingga terdapat celah yang mesti diteliti lebih lanjut, memberikan urgensi bagi pentingnya pengawasan terhadap kongruensi antara janji kampanye kepala daerah. Penelitian Oleh Andre Permata Juga membahas Kongruensi janji kampanye Mahyeldi dan Emzalmi selaku Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik Tentang Santunan Kematian. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini muncul dari segi fenomenologi yang berbicara mengenai kongruensi janji kampanye Audy untuk mensejahterakan UMKM dan petani milenial.

Untuk mengetahui kongruensi janji kampanye dan realisasi janji kampanye oleh kepala daerah, diperlukan rangkaian proses yang dapat menjelaskan bagaimana calon kepala daerah menyampaikan janji kampanye melalui media sosial dan terpilih sebagai kepala daerah, serta bagaimana realisasi program janji kampanye yang telah disampaikan.

Apabila tidak ada realisasi kebijakan yang berkaitan antara janji kampanye pada media sosial instagram Audy Joinaldy dengan program yang telah dilahirkan, maka secara tidak langsung akan berdampak kepada turunnya kepercayaan publik, serta munculnya sikap apatis pada pelaksanaan pilkada selanjutnya.¹³ Oleh sebab itu realisasi janji kampanye harus menjadi hal pokok yang harus diperhatikan oleh kandidat terpilih.

¹² Dede Sri Kartini, Rahman Mulyawan, and Iyep Saefulrahman, "Konsistensi Antara Program Partai Dengan Kebijakan Publik Di Kabupaten Bandung (2011—2015)," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2015): 336–53.

¹³ Rafli Arham and Yoskar Kadarisman, "Sikap 'Golput' Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran Pertama Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2013" (Riau University, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh bagaimana kongruensi antara janji kampanye dengan realisasi program yang dijalankan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy periode 2021-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kita berharap bahwa partai-partai melaksanakan sejumlah penekanan programatisnya jika berhasil duduk di pemerintahan? Mungkin kita harus menjawab pertanyaan ini secara terpisah, yakni untuk pemerintah yang terdiri dari satu partai dan terdiri dari koalisi. Dalam kasus yang pertama, hanya ada satu program terkait, yakni program partai yang menang. Dengan demikian kendala untuk memenuhi program terutama berkaitan dengan niat dan kemampuan partai (berhadapan dengan faktor-faktor eksternal) untuk melaksanakan programnya. Untuk kasus pemerintah yang terdiri dari sejumlah mitra koalisi, niat dan kemampuan saja tidak cukup; mitra-mitra koalisi itu, yakni partai-partai yang mungkin pernah saling bertentangan tajam dalam pemilu, harus membuat beberapa kesepakatan internal awal mengenai prioritas. Setidaknya dalam level pemerintahan, ini jelas berarti bahwa tak ada ranking prioritas dari partai manapun yang disetujui sepenuhnya, tetapi beberapa bentuk kompromi lah yang harus dilakukan.¹⁴

Audy Joinaldy berhasil memenangkan pemilu dan menjadi wakil gubernur dari Mahyeldi sebagai Gubernur Sumatera Barat, pasangan ini berhasil memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan calon yang lainnya.

¹⁴ Hans-Dieter Klingemann and others, *Partai, Kebijakan Dan Demokrasi* (Jentera bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000).

Tabel 1. 1 Perolehan Suara Pilkada Gubernur Sumbar 2020

Paslon No Urut.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Persentase
1.	Mulyadi-Ali Mukhni	Demokrat, PAN	614.477	27,42%
2.	Nasrul Abit-Indra Catri	Gerindra	679.069	30,3%
3.	Fakhrizal-Genius Umar	Golkar, Nasdem, PKB	220.893	9,86%
4.	Mahyeldi-Audy Joinaldy	PKS, PPP	726.853	32,43%

Sumber: *kpu.sumbar.go.id,2020*

Sebagai bentuk media informasi dan komunikasi, media sosial berperan dalam membantu pasangan calon dalam berkampanye melalui media sosial, masyarakat bisa langsung menyuarakan aspirasi dan keresahan mereka kepada kepala daerah atau pejabat publik yang mereka pilih.

Perbedaan jumlah pengikut yang dimiliki Audy ini ternyata tidak menjadi faktor penghalang untuk Audy berhasil memenangkan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Persiapan konten, ide, *editing* dan melempar janji-janji politik yang dilakukan Audy ternyata mampu menarik perhatian masyarakat untuk memilih pasangan ini.

Dapat dilihat dari salah satu contoh gambar beberapa postingan Audy pada media sosial yang menjanjikan Pertanian digital dan Peduli UMKM:

Gambar 1. 1 Postingan Janji Kampanye Audy

Wujudkan Pertanian Digital, Revolusi Industri 4.0 Di Sumatera Barat

Peluang pertanian digital sangat besar potensinya untuk dapat diwujudkan oleh generasi milenial Sumatera Barat. Teknologi ini juga memudahkan manajemen risiko di pertanian dengan mengoptimalkan potensi keuntungan yang bisa diraih. Pertanian digital juga akan lebih banyak menggunakan teknologi canggih seperti IoT (Internet of Things).

joinaldy • Ikuti

joinaldy • Peluang pertanian digital seharusnya dapat ditangkap oleh generasi milenial Sumatera Barat. Sehingga nantinya akan tumbuh dan berkembang petani yang tidak hanya sekedar bertani tetapi sudah mengutamakan profit oriented tentunya tanpa mengesampingkan kualitas.

Baca selengkapnya di www.audyjoinaldy.com

#MilenialManang
Telah disunting · 180 ming

deded_nqk 🙌🙌🙌
179 ming · Balas

khairarakay Mnrt saya peluang pertnain digital ini sangt bsr tapi masyrkt perlu di edukasi dulu

Disukai oleh ranggazamahendra dan 273 lainnya
10 JUNI 2020

Tambahkan komentar...

PEDULI UMKM

Audy Joinaldy untuk Sumatera Barat

Khusus warga Sumatera Barat yang produhnya ingin saya promosikan di akun Instagram

@joinaldy

Kirim materi poster ke audyjoinaldyforsubar@gmail.com

Pastikan ukuran feed Instagram 1:1 dan sertakan merk, foto produk, no telp dan akun Instagram. Semoga semakin laris manis dan berkah berlimpah

joinaldy • Ikuti
Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

joinaldy • Hati Hati Sukses Itu Menular

Nikmati prosesnya. Banyak belajar, terus inovasi dan kreatif. Semoga Allah mudahkan...

Jika minat promo gratis, tulis aamin di kolom komentar.

Lalu silakan kirim poster/gambar promo dgn ukuran kotak persegi ke email audyjoinaldyforsubar@gmail.com dan sertakan merk, foto produk, no telp dan akun Instagram pada poster/gambar. Terimakasih.

#MilenialManang
#UMKMSumbarBangkit
#sumbar #sumaterabarat #agam #dharma raya #mentawai #fim apuluhkota #padanganaman #pasaman #pasamanbarat #pesisi rselatan #sijunjung #solok #solokselatan #tanahdatar #bukitting

Disukai oleh ranggazamahendra dan 179 lainnya
22 JUNI 2020

Tambahkan komentar...

“ Dengan Program Digital Creative Entrepreneur Sumatera Barat Siap Cetak 100 Ribu Entrepreneur untuk Generasi Milenial Minang. ”

joinaldy • Ikuti
Kota Padang Sumatera Barat

joinaldy • Energi generasi milenial terlalu besar untuk dianggap hanya sebagai sebuah potensi. Kekuatan ini perlu dikelola agar menjadi letupan produktif untuk kemakmuran Sumatera Barat. Kesempatan nyata harus terasa hingga lapisan masyarakat paling bawah. Akses modal wirausaha harus menjangkau kalangan manapun

Kepastian hukum berwirausaha harus ditegakkan demi terciptanya rasa aman berwirausaha di Kota Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Inilah peran Pemerintah Sumbar harus hadir di tengah-tengah anak muda Sumatera Barat

Basamo Mambangun Sumatera Barat Madani #MilenialManang yang Buya @mahyeldisp dan saya perjuangkan pada Pilgub 2020 ini adalah sebuah gagasan besar untuk Milenial Sumatera Barat. Generasi milenial harus mendapat tempat dalam pembangunan bangsa. Karena pada akhirnya masa depan Sumatera Barat ini

Disukai oleh ranggazamahendra dan 336 lainnya
22 OKTOBER 2020

Tambahkan komentar...

Sumber: Instagram @joinaldy

Audy Joinaldy menyampaikan program unggulan dan janji kampanyenya di Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020 melalui unggahan-unggahan media sosial seperti gambar diatas. Janji-janji kampanye yang disampaikan oleh Audy pada unggahan instagramnya seperti:

Tabel 1. 2 Janji Kampanye Audy Joinaldy dalam unggahan Instagram

No	Janji Kampanye Instagram
1.	Wujudkan pertanian Digital, Revolusi Industri 4.0 di Sumatera Barat
2.	Peduli UMKM Sumatera Barat
3.	Program <i>Digital Creative Entrepreneur</i> untuk 100.000 Millennial Minang Entrepreneur
4.	Pengusaha Unggas sukses di era 4.0 dan New Normal

Berdasarkan Janji kampanye Audy Joinaldy pada postingan media sosial instagramnya dalam gambar 1,1, terdapat 5 program unggulan yang selalu di suarkan Audy di setiap unggahannya. Program-program dan janji kampanye yang menekankan pada aspek UMKM dan Milenial ini justru tidak serta merta mensejahterakan masyarakat pada saat Audy telah terpilih sebagai wakil gubernur Sumatera Barat, apalagi pada masa pandemi melanda dimana banyak kebijakan yang dilahirkan justru menjadi kontradiktif dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, seperti pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur dan Wakil gubernur pada saat provinsi sedang dalam kondisi kritis akibat pandemi Covid-19.¹⁵

Dalam tujuan dan sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang mengemban 7 misi dijabarkan menjadi 7 tujuan

¹⁵ Yola Sastra, "Kepekaan, Kirisi Covid-19, Dan Mobil Dinas Baru Gubernur Sumbar," *Kompas.Id*, 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/18/kepekaan-krisis-covid-19-dan-mobil-dinas-baru-gubernur-sumbar>.

dan 27 sasaran, terdapat beberapa program janji kampanye yang pernah disampaikan oleh Audy pada postingan media sosial instagramnya. Tertuang dalam dalam misi 4: meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil menengah serta ekonomi berbasis digital; (i) Sumbar sebagai pusat perdagangan, (ii) Terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, (vi) Meningkatnya peran ekonomi digital.¹⁶

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai

¹⁶ Provinsi Sumatera, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat Tahun 2021-2026* (Indonesia, 2021), pp. 1-499
<https://ppid.sumbarprov.go.id/images/2021/11/file/Perda_No_6_RPJMD_4_Oktober_2021.pdf>.

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dalam Visi dan Misi Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat juga didukung dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu; 1. Sumbar Sehat dan Cerdas, 2. Sumbar Relegius dan Berbudaya, 3. Sumbar Sejahtera, 4. Sumbar Berkeadilan.

Gambar 1.2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026



Sumber: Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Meskipun Audy Joinaldy telah menyampaikan janji kampanye berupa Visi dan Misi yang menekankan pada peduli UMKM dan petani, namun kegagalan dalam menjalankan program-program ini pada saat pandemic covid-19 justru merugikan UMKM dan petani itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwa

belum terdapat kongruensi yang kuat, antara janji kampanye dan kebijakan peduli UMKM dan petani oleh Audy Joinaldy.

Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan dan menganalisis kongruensi antara janji kampanye pada media sosial Instagram, dengan kebijakan yang dihasilkan pada pasca terpilihnya Audy Joinaldy sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana kongruensi antara janji kampanye pada media sosial Instagram dan program yang di rancang oleh Audy Joinaldy, sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada penjelasan dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kongruensi antara Janji Kampanye pada media sosial Instagram dan program yang telah dijalankan oleh Audy Joinaldy, sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi-studi yang berkaitan dengan janji kampanye para elit politik, atau studi-studi yang membahas mengenai realisasi janji kampanye oleh kepala daerah. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada elit-elit politik, khususnya dalam menyusun janji kampanye yang hendak disampaikan kepada masyarakat.